ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DESA DI
KECAMATAN PINO RAYA DAN KECAMATAN BUNGA MAS KABUPATEN
BENGKULU SELATAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Oleh

Amira Nabila¹, Fadli², Tiolina Evi Nausta pardede³

^{1,2,3}Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Perbanas Institute Jakarta

Email: [1amiranabila80@gmail.com](mailto:amiranabila80@gmail.com), [2fadli02031973@gmail.com](mailto:fadli02031973@gmail.com), [3tiolinaevi@gmail.com](mailto:tiolinaevi@gmail.com),

Abstract

This research aims to analyze and describe the financial performance of village governments in Pino Raya and Bunga Mas Districts, South Bengkulu Regency, during the Covid-19 pandemic period (2020–2021). The study employed a purposive sampling technique, with a sample consisting of 30 villages that submitted their APBDes (Village Budget Realization Reports) to the Office of Village Community Empowerment in South Bengkulu. The data used in this research included both secondary data in the form of budget realization reports and primary data obtained through observation. The analytical methods applied were descriptive statistical analysis and observational techniques. The evaluation of financial performance was conducted using the value for money approach, which assesses performance based on three key indicators: economy, efficiency, and effectiveness. The findings of the study indicate that, on average, the financial performance of the village governments was categorized as economical, relatively ineffective in terms of efficiency, and moderately effective in achieving the planned budget targets. These results suggest that although financial management was prudent during the pandemic, improvements are still needed, particularly in enhancing the efficiency of spending to optimize local revenue potential.

Keywords: *Financial Performance For Village Governments, The Pandemic Covid-19, Value For Money*

PENDAHULUAN

Penyebaran virus Covid-19 yang berujung menjadi pandemi di Indonesia, mengakibatkan penurunan drastis pada pelaku ekonomi berskala besar serta terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat yang berpengaruh terhadap capaian kinerja pemerintah secara nasional, terutama pada kinerja keuangan pemerintah pusat yang mengalami penurunan selama pandemi pada sisi pendapatan nasional, hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada terganggunya aspek perekonomian dan pembangunan pemerintah desa di masa pandemi Covid-19, dimana selama ini pemerintah desa banyak mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat sejak diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kinerja keuangan pemerintah desa merupakan laporan keuangan pemerintah desa yang menunjukkan hasil pengelolaan dan pemanfaatan keuangan desa sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah direalisasikan (Lestari dkk, 2020). Kinerja keuangan pemerintah desa melalui laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat menjadi tinjauan bagi desa untuk mewujudkan *good governance*. Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja keuangan menjadi aspek penting dalam menilai akuntabilitas publik. Akuntabilitas kinerja pemerintah desa tidak hanya sekedar menilai kemampuan bagaimana uang desa dibelanjakan, akan tetapi meliputi bagaimana kemampuan pemerintah desa dalam mengelola

bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pengukuran terhadap pengelolaan keuangan desa secara ekonomi, efisien, dan efektivitas dilakukan untuk melihat prestasi atau capaian kinerja keuangan pemerintah desa selama ini sebagai bahan evaluasi pemerintah desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara baik dimasa mendatang. Salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah desa adalah dengan melakukan pengukur kinerja keuangan pemerintah desa menggunakan konsep *value for money*.

Keberhasilan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan dan belanja desa sesuai dengan APBDes yang telah disepakati akan berpengaruh baik terhadap capaian kinerja keuangan pemerintah desa, hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah desa mampu mengelola keuangan desa sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya. Namun, adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kegiatan ekonomi berskala besar dapat mempengaruhi realisasi pendapatan pemerintah desa yang telah dianggarkan sebelumnya, hal ini dapat juga mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah desa di masa pandemi Covid-19.

Penelitian yang dilakukan Onibala et al (2021), hasil penelitiannya selama pandemi Covid-19 kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Minahasa mengalami penurunan yang signifikan terhadap realisasi pendapatan Kabupaten Minahasa selama pandemi Covid-19 sehingga kinerja keuangan di Kabupaten Minahasa mengalami penurunan di masa Pandemi Covid-19. Namun, hasil penelitian yang berbeda diungkapkan oleh Iriani et al (2021) dalam penelitiannya, dimana kinerja keuangan pada Pemerintah Desa Landungsari selama pandemi Covid-19 tidak mengalami penurunan akan tetapi mengalami peningkatan. Adanya perbedaan hasil penelitian dari beberapa ahli mengenai kinerja keuangan pemerintah di masa pandemi Covid-19 terutama pada pemerintah desa yang

mengalami peningkatan terhadap capaian kinerja keuangan di masa pandemi Covid-19, membuat peneliti tertarik untuk membuktikan secara empiris mengenai kinerja keuangan pemerintah desa di masa pandemi Covid-19.

Pada tahap ini peneliti memperoleh informasi dari data laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 dan 2021 selama pandemi Covid-19 terutama pada realisasi pendapatan yang mengalami penurunan secara berturut-turut yaitu terletak pada pemerintah di Kecamatan Pino Raya dan Kecamatan Bunga Mas.

Tabel 1. Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa di Kecamatan Pino Raya dan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 dan 2021

Tahun	Kecamatan	Pendapatan		%
		Anggaran	Realisasi	
2020	Pino Raya	25.682.452.294	25.944.740.072	101,0%
2021	Pino Raya	24.582.491.208	24.049.367.349	97,8%
2020	Bunga Mas	11.026.724.010	11.035.200.753	100,1%
2021	Bunga Mas	11.395.923.800	11.259.427.662	98,8%

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Selatan (2022)

Adanya penurunan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan selama pandemi Covid-19 secara berturut-turut dari tahun 2020-2021 sangat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan capaian kinerja keuangan pemerintah desa di Kecamatan Pino Raya dan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan di masa pandemi Covid-19, hal ini juga sangat berpengaruh terhadap capaian realisasi belanja pemerintah desa, maka dari itu peneliti tertarik untuk menjadi pemerintah desa di dua kecamatan tersebut menjadi sampel penelitian. Pengambilan sampel pada dua kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan ini dilakukan untuk melihat mampukah pemerintah desa tersebut mengelola keuangan desa berupa pendapatan dan belanja secara ekonomi, efisien dan efektivitas selama pandemi Covid-19 sehingga menghasilkan kinerja keuangan yang baik selama pandemi Covid-19 untuk membuktikan secara empiris, maka peneliti

akan melakukan pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah desa di Kecamatan Pino Raya dan Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan saat pademi Covid-19. Salah satu cara yang dapat melihat pengelolaan keuangan secara ekonomi, efisien, dan efektivitas adalah mengukur kinerja keuangan pemerintah desa menggunakan konsep *value for money*.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah desa dengan menggunakan konsep *value for money* dapat membantu pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas pelayanan sesuai sasaran dan mutu pelayanan, mampu melihat penghematan pemerintah desa dalam menggunakan pendapatan desa, mampu mengalokasi belanja secara tepat untuk kepentingan publik serta mampu meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa kepada pihak publik selama pandemi Covid-19.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa di Kecamatan Pino Raya dan Kecamatan Bunga Mas telah menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik dari sisi ekonomi dan efektivitas selama pandemi Covid-19, namun masih terdapat kelemahan dari sisi efisiensi. Hal ini mengindikasikan perlunya perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih optimal, khususnya dalam mendorong pemanfaatan potensi ekonomi desa seperti BUMDes. Pemerintah daerah perlu memberikan pendampingan dan penguatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan keuangan agar belanja desa tidak hanya tepat guna, tetapi juga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli desa secara berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki posisi strategis dalam struktur pemerintahan nasional karena merupakan unit terkecil dari pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat akar rumput (*grassroots*). Dengan adanya pengakuan terhadap hak asal usul dan hak tradisional, desa tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki kewenangan otonom dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik lokalnya. Oleh karena itu, desa memiliki keleluasaan untuk menggali potensi sumber daya, menetapkan prioritas pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan, demi terwujudnya kemandirian desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa berisi atau memuat tentang pendapatan, belanja serta pembiayaan desa untuk tahun periode anggaran yang terdiri dari Pendapatan desa yaitu Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Belanja desa yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa belanja modal, dan belanja tak terduga. Pembiayaan Desa yaitu SILPA.

Kinerja

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat maupun capaian dalam pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi, tertuang dalam strategic planning organisasi tersebut (Mahsun, 2016). Kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi pada periode tertentu yang telah disepakati. Dari definisi kinerja diatas, maka kinerja ialah capaian dari kegiatan, pelaksanaan

dan program kerja untuk mewujudkan sasaran, dan tujuan dari organisasi tersebut.

Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dalam menilai sejauh mana kemajuan suatu pekerjaan, pencapaian tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Mahmudi (2015), pengukuran kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap output yang dihasilkan, tetapi juga mencakup informasi mengenai tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa publik. Proses ini bertujuan untuk membandingkan hasil yang dicapai dengan target yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan program atau kegiatan telah berjalan sesuai harapan. Dalam konteks sektor publik, pengukuran kinerja menjadi instrumen penting dalam mendorong akuntabilitas, transparansi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengukuran kinerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam perbaikan tata kelola pemerintahan.

Tujuan dan Manfaat Kinerja Sektor Publik

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan dapat membantu maupun memperbaiki kinerja pemerintah yaitu membantu organisasi pemerintah dalam mencapai sasaran maupun tujuan dari program unit kinerja. Akibatnya, pemerintah dapat dengan mudah melakukan peningkatan secara efisiensi dan efektifitas dalam memberikan pelayanan terhadap pihak publik.
2. Pengukuran kinerja terhadap sektor publik dapat digunakan sebagai alat pengalokasian sumber daya organisasi dan sebagai alat dalam pembuatan keputusan.
3. Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik dilakukan dalam mewujudkan akuntabilitas publik serta dapat memperbaiki komunikasi organisasi.

Konsep Value For Money Pada Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Halim & Kusufi (2017), konsep *value for money* (VFM) adalah konsep digunakan untuk pengukuran berbasis kinerja pada sektor publik baik itu kinerja keuangan dan kinerja bukan keuangan yang dikelola berdasarkan tiga komponen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Prinsip akuntabilitas dan transparansi serta kinerja dapat diperbaiki dengan konsep *value for money*. Adapun tujuan *value for money* yang dilakukan organisasi publik adalah:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dengan artian pelayanan tercapai sesuai sasaran.
2. Meningkatkan pelayanan publik yang sesuai mutu.
3. Menurunkan biaya pelayanan publik sebab hilangnya inefisiensi serta terjadinya penghematan dalam menggunakan input.
4. Alokasi belanja akan diorientasikan untuk kepentingan publik.
5. Meningkatkan pentingnya uang publik (*public costs awareness*). sebagai akar akuntabilitas publik dilaksanakan.

Berikut ini 3 (tiga) komponen utama dalam mengukur kinerja keuangan menggunakan konsep *value for money* (ekonomi, efisiensi dan efektivitas) adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran Ekonomi

Menurut Mahsun (2016) ekonomi merupakan kegiatan yang disebut sebagai kegiatan penghematan atau tepat guna yang dilakukan oleh organisasi sektor publik, dimana organisasi sektor publik melakukan kehematan atas pengelolaan keuangan secara berhati-hati sehingga tidak menimbulkan pemborosan dalam melakukan suatu kegiatan. Pengukuran kinerja keuangan suatu organisasi sektor publik dikatakan ekonomis jika mampu melakukan penghematan penggunaan anggaran dana dalam membiayai kegiatan organisasi sektor publik (Mahsun, 2016)

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi menggambarkan kaitan antara *output* yang dihasilkan suatu organisasi/kegiatan dengan *input* yang digunakan. Efisiensi merupakan daya guna organisasi atau cara meminimalkan kerugian penggunaan sumber daya ekonomi, dimana semakin besar keluaran (*output*) yang dicapai dibandingkan dengan masukan (*input*), maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi tersebut (Mardiasmo, 2009).

3. Pengukuran Efektivitas

Menurut Halim dan Kusufi (2017:130), efektivitas merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana suatu organisasi sektor publik berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas tidak hanya diukur dari tercapainya *output*, tetapi juga dari kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan target yang direncanakan dalam anggaran. Sebuah organisasi dapat dikatakan efektif apabila mampu menghasilkan keluaran (*output*) yang sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun waktu pencapaian. Dalam konteks pengelolaan keuangan sektor publik, efektivitas menjadi indikator penting untuk menilai kinerja suatu entitas, karena menunjukkan kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan sumber daya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas sangat relevan digunakan dalam evaluasi kinerja keuangan, termasuk dalam penilaian terhadap realisasi anggaran dan capaian program-program pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta serta karakteristik populasi atau fenomena yang diteliti. Dalam konteks ini, penulis akan mendeskripsikan serta menganalisis data berbentuk angka-angka yang

bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada pemerintah desa yang berada di wilayah Kecamatan Pino Raya dan Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, selama masa pandemi Covid-19, yaitu tahun anggaran 2020 hingga 2021. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah desa melalui pendekatan pengukuran *value for money* yang mencakup prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pendekatan ini dipilih agar dapat memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana pengelolaan keuangan desa dilakukan secara optimal dalam situasi krisis kesehatan global, serta implikasinya terhadap pelayanan publik di tingkat lokal.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah desa di Kecamatan Pino Raya dan Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada masa pandemi Covid-19 dilakukan dengan menggunakan pendekatan *value for money*. Pendekatan ini merupakan suatu konsep dalam pengelolaan sektor publik yang menekankan pada pencapaian hasil optimal dari penggunaan sumber daya yang tersedia. *Value for money* terdiri atas tiga elemen utama, yaitu ekonomi (penghematan biaya), efisiensi (perbandingan *input-output*), dan efektivitas (tingkat pencapaian tujuan yang ditetapkan).

Rasio Ekonomi

Rasio ekonomi merupakan rasio yang dapat mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, hal ini dilakukan agar tidak terjadi pemborosan atau belanja yang tidak produktif. Pengukuran tingkat ekonomi merupakan perbandingan *input* dan *input value*.

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{(\text{input}) \text{ Anggaran Belanja}}{(\text{input value}) \text{ Realisasi Belanja}} \times 100\% \text{ (Mahmudi, 2015)}$$

Tabel 2. Kriteria Ekonomi Kinerja Keuangan

Persentase Pengukuran	Kriteria Ekonomi
>100%	Ekonomis
85%-100%	Cukup Ekonomis
65% - 84%	Kurang Ekonomis
< 65%	Tidak Ekonomis

Sumber : Mahmudi, 2015

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan hubungan antara *output* yang dihasilkan sebuah kegiatan dengan input yang digunakan organisasi sektor publik. Untuk mengukur dan melihat tingkat *input* dari organisasi publik terhadap tingkat *outputnya*.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times$$

100% (Mahmudi, 2015)

Tabel 3. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Pengukuran	Kriteria Efisiensi
<90%	Sangat Efisien
90% - 99%	Efisien
= 100 %	Cukup Efisien
>100%	Tidak Efisien

Sumber : Mahmudi, 2015.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan pengukur tingkat capaian *output* dari organisasi sektor publik terhadap target pendapatan.

$$\text{Rasio Efektivitas Keuangan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\% \text{ (Mahmudi, 2015)}$$

Tabel 4. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase Pengukuran	Kriteria Efisiensi
>100%	Efektif
85% - 100%	Cukup Efektif
65% - 84%	Kurang Efektif
<65%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi, 2015.

Populasi dan Metode Pengumpulan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah desa di Kecamatan Pino Raya dan Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan yang berjumlah 31 pemerintah desa yaitu berupa data Laporan Realisasi APBDes tahun 2020-2021. Metode pengumpulan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, sehingga sampel dalam penelitian ini memiliki kriteria yaitu pemerintah desa di Kecamatan Pino Raya dan Bunga Mas yang menyampaikan Laporan Realisasi APBDes kepada Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Selatan selama tahun 2020-2021.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder dan data primer (data pendukung). Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kecamatan Pino Raya dan Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan di masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 yang bersumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terletak di Kabupaten Bengkulu Selatan. Data primer adalah berupa observasi lapangan dilakukan untuk mendapatkan informasi sebagai penguat perhitungan peneliti.

Metode Analisis Data**1. Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), Standar deviasi (*standar deviation*), dan maksimum-minimum, *mean* digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-rata dari sampel. Adapun dalam penelitian ini, nilai maksimum dan minimum digunakan untuk melihat desa mana saja yang memiliki kinerja keuangan tertinggi dan terendah untuk setiap rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas, sedangkan nilai rata-rata digunakan

untuk melihat rata-rata kinerja pemerintah desa di Kecamatan Pino Raya dan Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan di masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 untuk setiap rasio. Perhitungan statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS 26.

2. Melakukan Observasi

Setelah dilakukannya perhitungan terkait kinerja keuangan pemerintah desa di Kecamatan Pino Raya dan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2020-2021, maka terlihat masing-masing rasio ekonomi, efisien dan efektivitas pemerintah desa sehingga desa tersebut dapat memiliki kinerja keuangan tertinggi dan terendah maka peneliti akan langsung melakukan observasi lapangan terhadap pemerintah desa tersebut, apakah benar pemerintah desa tersebut telah melakukan kinerja keuangan sesuai kriteria yang peneliti berikan, observasi berupa melihat realisasi pendapatan atau realisasi belanja pemerintah desa selama pandemi Covid-19 yang berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan desa di masa pandemi Covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 5. Kriteria Ketentuan Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah Desa	Persentase	Observasi
1	Jumlah Pemerintah Desa di Kecamatan Pino Raya dan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan	31	100%	62
2	Jumlah pemerintah desa di Kecamatan Pino Raya dan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan	(1)	3%	2

yang tidak memiliki dokumen APBDes dan Laporan Realisasi APBDes yang berada di Dinas PMD Bengkulu Selatan dari tahun 2020-2021 secara berturut-turut.			
Jumlah	30	97%	60

Sumber: data sekunder diolah, 2022

Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 6. Statistik Deskriptif Rasio Ekonomi Pemerintah Desa di Kecamatan Pino Raya dan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan di masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021

	N	Min	Maks	Rata-rata	Std. Deviasi	Ket	
						P.Desk Terendah	P.Desk Tertinggi
R.EKONOMI (2020-2021)	60	1,43	1,00	1,0797	0,07413		
Valid N (listwise)	60					Tunggal I	Padang Jawi

Sumber: data sekunder diolah, 2022

Tabel 7. Statistik Deskriptif Rasio Efisiensi Pemerintah Desa di Kecamatan Pino Raya dan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan di masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021

	n	Min	Maks	Rata-rata	Std. Deviasi	Ket	
						P.Desk Terendah	P.Desk Tertinggi
R.EFISIENSI 2020-2021	60	0,82	1,21	1,0126	0,05755	Kemang Manis	Talang Padang
Valid N (listwise)	60						

sumber: data sekunder diolah, 2022

Tabel 8. Statistik Deskriptif Rasio Efektivitas Pemerintah Desa di Kecamatan Pino Raya dan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan di masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021

	n	Min	Maks	Rata-rata	Std. Deviasi	Keterangan	
						P. Desa Terendah	P. Desa Tertinggi
R.EFEKTIVITAS (2020-2021)	60	0,77	1,27	0,9940	0,04745		
Valid N (listwise)	60					Talang Padang	Kemang Manis

Sumber: data sekunder diolah, 2022

Pembahasan Rasio Ekonomi, Rasio Efisien dan Rasio Efektivitas.

Kinerja keuangan pemerintah desa di Kecamatan Pino Raya dan Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan di masa pandemi Covid-19 kurun waktu 2 tahun yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2021 berdasarkan pendekatan *value for money* yang dilihat berdasarkan rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas menunjukkan bahwa jika dilihat dari rasio ekonomi yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja secara rata-rata berada pada kategori ekonomis, dimana dibuktikan dari nilai rata-rata ekonomis (tabel 4.2) yang menunjukkan persentase lebih besar dari 100% yaitu sebesar 108%.

Hal ini mengidentifikasi bahwa secara rata-rata pemerintah desa di Kecamatan Pino Raya dan Kecamatan Bunga Mas di masa pandemi Covid-19 telah mampu mengelola keuangan desanya secara hati-hati dan tidak ada pemborosan. Namun perlu diperhatikan juga apakah pemerintah desa di Kecamatan Pino Raya dan Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan memang telah hemat dalam merealisasikan belanjanya sesuai dengan yang dianggarkan dikarenakan adanya ketakutan dari pemerintah desa dalam administrasi dan teknis penggunaan anggaran di masa pandemi Covid-19 yang sering berubah-ubah.

Jika dilihat dari rata-rata rasio ekonomi pemerintah desa di Kecamatan Pino Raya dan Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan di masa pandemi Covid-19 selama tahun 2020 dan tahun 2021 tetap berada pada kategori

ekonomis. Pada tahun 2020 terdapat 22 desa dikategorikan ekonomis dan 8 desa dikategorikan cukup ekonomis, sedangkan di tahun 2021 semua pemerintah desa kinerja keuangannya berada pada kategori ekonomis. Jika dilihat secara keseluruhan selama pandemi Covid-19 selama tahun 2020-2021 desa yang memiliki rasio ekonomis paling tinggi adalah Desa Tungkal I tahun 2020 dengan kategori ekonomis dan desa yang memiliki rasio ekonomis paling rendah adalah Desa Padang Jawi tahun 2020 yang dikategorikan cukup ekonomis.

Pada tahun 2020-2021 dalam capaian kinerja keuangan ditinjau dari rasio ekonomi pemerintah Desa di Kecamatan Pino Raya dan Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan telah mampu mengelola keuangannya secara ekonomis hal ini dapat dilihat pada perhitungan rasio ekonomi dimana terdapat 52 observasi yang memiliki rasio ekonomis dengan persentase >100% yang itu artinya menurut Mahmudi (2015) masuk pada kategori ekonomis. Pada saat yang bersamaan dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti didapatkan bahwa desa-desa di Kecamatan Pino Raya dan Kecamatan BungaMas telah mampu mengelola belanja desa yang direalisasikan untuk pencegahan penanganan pandemi Covid-19 di lingkungan desa contohnya penyaluran bantuan langsung tunai yang diberikan untuk masyarakat yang terkena dampak Covid-19 misal masyarakat yang di PHK dan masyarakat yang kehilangan mata pencahariaannya di masa pandemi Covid-19, bukan itu saja pemerintah desa juga mampu tetap melakukan padat karya pembangunan desa walaupun hanya mampu melakukan satu pembangunan di setiap tahunnya misalnya pembangunan fasilitas desa seperti ebung dan jalan sirtu untuk pertanian. Hal ini sejalan Permendes PDTT nomor 6 tahun 2020 dan Permendes PDTT nomor 7 tahun 2021 dimana penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membantu perekonomian masyarakat desa di masa pandemi Covid-19.

Selanjutnya kinerja keuangan pemerintah desa di Kecamatan Pino Raya dan Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan di masa pandemi Covid-19 yang dilihat berdasarkan rasio efisiensi yang diukur dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan realitas pendapat dikatakan efisien, hal tersebut terbukti dari hasil rata-rata rasio efisiensi pemerintah desa di Kecamatan Pino Raya dan Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan di masa pandemi Covid-19 tahun 2020 - 2021 yang menunjukkan persentase lebih dari 100% yaitu sebesar 101% dimana persentase tersebut masuk pada kategori tidak efisien (tabel 4.3). Hal tersebut mengidentifikasi bahwa secara rata-rata pemerintah desa di Kecamatan Pino Raya dan Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan di masa pandemi Covid-19 belum mampu merealisasikan pendapat melebihi realisasi belanjanya atau bisa dikatakan bahwa pemerintah desa belum mampu mengefisienkan belanja desa untuk memperoleh pendapatan desanya selama pandemi Covid-19.

Jika dilihat dari rasio efisien secara rata-rata yang memiliki nilai sebesar 101% yang artinya tidak efisien, hal ini sejalan dengan perhitungan rasio efisiensi, dimana selama tahun 2020-2021 terdapat sebanyak 60 observasi terdapat 39 observasi dikategorikan tidak efisien. Adapun desa yang selalu mendapatkan kategori tidak efisien ada sejumlah 11 desa sedangkan desa lainnya memiliki nilai rasio yang meningkat dan menurun. Pada tahun 2020 terdapat 1 desa yang dikategorikan sangat efisien, 4 desa dikategorikan efisien, 7 desa dikategorikan cukup efisien dan 18 desa dikategorikan tidak efisien. Sedangkan untuk tahun 2021 tidak ada desa yang dikategorikan sangat efisien, kemudian terdapat 15 desa dikategorikan efisien, 4 desa dikategorikan cukup efisien dan 11 desa dikategorikan tidak efisien. Untuk selama tahun 2020-2021 terdapat desa yang paling efisien yaitu Desa Kemang Manis di

tahun 2020 yang dikategorikan sangat efisien dengan besar rasio yaitu 82%, sedangkan desa yang dikategorikan paling tidak efisien adalah Desa Talang Padang di tahun 2021 yang dikategorikan tidak efisien dengan nilai rasio efisien sebesar 121%.

Penyebab yang membuat banyak desa di masa pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021 tidak mampu mencapai kinerja keuangan secara efisien karena desa-desa selama pandemi Covid-19 tidak mampu pemerintah desa dalam mengelola belanja desa untuk mengoptimalkan BUMDES sehingga selama 2 tahun terdapat 26 desa tidak memiliki penghasilan dari BUMDES dengan kata lain pemerintah desa tidak mampu merealisasikan PADes untuk membantu meningkatkan pendapatan desa yang diberikan untuk kesejahteraan masyarakat, belum lagi di tahun 2021 terjadi pemotongan dana desa sebesar 10% di setiap desanya yang menyebabkan desa tidak mampu merealisasikan capaian pendatannya sebesar 100% . Hal ini sejalan dengan nilai rasio ekonomi yang mengalami penurunan penyerapan realisasi belanja akibat adanya penurunan realisasi pendapatannya, bukan itu saja di tahun 2021 juga semua pemerintah desa tidak mampu mendapatkan nilai rasio efektivitas lebih dari 100% akibat penurunan dari realisasi pendapatan desa. Kejadian ini bisa terjadi karena pihak pemerintah desa kurang memperhatikan perencanaan anggaran baik pada anggaran pendapatan dan anggaran belanjanya di tahun 2021.

Desa yang masuk pada kategori sangat efisien adalah pemerintah desa yang mampu memiliki realisasi belanja yang tidak melebihi realisasi pendapatannya dengan persentase kurang dari 90%. Sebagai contoh desa yang dikategorikan sangat efisien yaitu pemerintah Desa Kemang Manis tahun 2020 dengan realisasi belanja sebesar Rp 1.140.062.150 dan realisasi pendapatan sebesar Rp 1.397.802.800. Adapun desa yang masuk dalam kategori efisien adalah desa yang merealisasikan belanja desanya dibandingkan dengan realisasi

pendapatannya sebesar 90%-99%, seperti Desa Kembang Seri tahun 2021 dengan realisasi belanja sebesar Rp 1.212.588.882 dan realisasi pendapatan sebesar Rp 1.228.651.808. Untuk desa yang masuk pada kategori cukup efisien adalah desa yang memiliki nilai rasio efisien nya sebesar 100%, seperti Desa Selali tahun 2021 dengan realisasi belanja sebesar Rp 1.490.246.030 dan realisasi pendapatan sebesar Rp 1.483.299.140. Sedangkan desa yang masuk pada kategori tidak efisien adalah pemerintah desa yang memiliki realisasi belanja melebihi realisasi pendapatannya dengan persentase lebih dari 100%. Contohnya yaitu pemerintah Desa Tanggo Raso di tahun 2020 dengan nilai realisasi belanja sebesar Rp 1.265.973.910 dan realisasi pendapatan sebesar Rp 1.156.554.388.

Selanjutnya kinerja keuangan pemerintah desa di Kecamatan Pino Raya dan Bunga Mas di masa pandemi Covid-19 yang dilihat berdasarkan rasio efektivitas memiliki nilai rata-rata rasio efektivitas sebesar 99,4% (tabel 4.4), yang menunjukkan rata-rata pemerintah desa di Kecamatan Pino Raya dan Kecamatan Bunga Mas pada tahun 2020-2021 cukup efektif dalam merealisasikan capaian pendapatannya, dimana menurut Mahmudi (2015) jika mendapatkan hasil rasio efektivitas sebesar 85% -100% artinya dapat dikategorikan cukup efisien.

Pada tahun 2020 dan tahun 2021 lebih dari setengah desa di Kecamatan Pino Raya dan Bunga Mas dikategorikan cukup efektif, dimana di tahun 2020 terdapat 24 desa dikategorikan cukup efektif dan 6 desa dikategorikan efektif, sedangkan di tahun 2021 mengalami penurunan tingkat efektivitas desa semuanya dikategorikan cukup efektif dengan jumlah 30 desa. Dari 60 observasi didapatkan desa yang paling efektif adalah Desa Kemang Manis dengan nilai rasio 127% sedangkan desa yang paling kecil nilai efektifitasnya adalah Desa Talang Padang tahun 2021 yaitu sebesar 77%.

Penurunan tingkat efektivitas pemerintah desa terhadap kinerja keuangannya

diakibatkan oleh capaian pendapatan desa yang tidak dapat melebihi anggaran pendapatannya, hal ini diakibatkan oleh terjadinya penurunan realisasi pendapatan transfer sebesar 10% dan tidak mempunya pemerintah desa dalam mengoptimalkan dana untuk pengelolaan badan usaha milik desa, sehingga 24 desa di Kecamatan Pino Raya dan Bunga Mas hanya mengandalkan pendapatan dari pendapatan transfer saat pandemi Covid-19.

Namun walaupun pemerintah desa di Kecamatan Pino Raya dan Bunga Mas hanya mampu merealisasikan rasio efektivitas sebesar 99%, hal ini tidak berdampak oleh capaian pemerintah desa dalam melaksanakan kinerjanya untuk kepentingan masyarakat, dimana pihak dari masyarakat menyatakan bahwa selama pandemi Covid-19 mereka sangat merasakan kinerja dari pihak pemerintah desa yaitu mulai dari merasakan program kerja kesehatan rutin untuk lansia, a anak-anak dan ibu hamil berupa posyandu, program kerja peningkatan pendidikan yaitu berupa penyelenggaraan PAUD di desa, program keagamaan dan kebudayaan desa berupa perbaikan rumah ibadah dan rumah adat desa, program pembangunan desa yang masih berjalan seperti pembangunan jalan Sirtu, embung, kandang sapi, kamar mandi, lampu jalan, Spal dll, dan yang paling utama masyarakat desa merasakan realisasi dana desa yang diperuntukan untuk menyelenggarakan program pencegahan pandemi Covid-19 di lingkungan desa berupa pemberian bantuan langsung tunai kepada pihak masyarakat yang tepat sasaran demi meningkatkan perekonomian masyarakat desa selama pandemi Covid-19, bukan hanya itu saja pihak pemerintah desa juga memberikan bantuan material berupa pemberian alat cuci tangan, pemberian masker gratis, pemberian sembako untuk yang melakukan karantina mandiri dan terutama membuat posko untuk penanganan kesehatan masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Desa yang masuk pada kategori efektif adalah desa yang mampu merealisasikan pendapatannya melebihi dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan di dalam APBDesa dengan persentase lebih dari 90%. Salah satu pemerintah desa yang mampu merealisasikan pendapatannya melebihi anggaran pendapatannya adalah desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya di tahun 2020 yang memiliki anggaran pendapatan sebesar Rp1.149.425.200 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp 1.169.352.781 dengan persentase sebesar 102%. Adapun desa yang masuk pada kategori cukup efektif adalah desa yang memiliki realisasi pendapatan desa nya dibandingkan dengan anggaran pendapatannya sebesar 85%-100%, seperti pemerintah desa Tunggal II di Kecamatan Pino Raya pada tahun 2020 yang memiliki anggaran pendapatan sebesar Rp1.102.608.200 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp1.102.859.314 besar rasio 100%. Desa yang masuk pada kategori kurang efektif adalah desa yang realisasi pendapatannya jika dibandingkan dengan capaian anggaran pendapatannya di bawah 65%-84%, seperti Desa Talang Padang tahun 2021 anggaran pendapatan sebesar Rp1.028.738.200 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp795.967.600 besar rasio 77%. Sedangkan desa yang masuk kategori tidak efisien adalah desa yang tidak mampu mencapai anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan persentase kurang dari 65% (Mahmudi, 2015).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan pemerintah desa di Kecamatan Pino Raya dan Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan di Masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 dilihat dari rasio ekonomi, secara rata-rata telah masuk

pada kategori ekonomis dengan rata-rata persentase rasio sebesar 108% yang menunjukkan bahwa secara rata-rata pemerintah desa telah mengelola keuangan desa terutama dalam merealisasikan belanja desa yang lebih kecil dari anggaran belanja desa atau dengan kata lain pihak pemerintah desa telah mampu mengalokasikan belanja desa secara tepat untuk kepentingan masyarakat desa selama pandemi Covid-19 dan tidak melakukan pemborosan dalam merealisasikan belanjanya.

2. Kinerja keuangan pemerintah desa di Kecamatan Pino Raya dan Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan di masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 dilihat dari rasio efisiensi, secara rata-rata sebesar 101%, dimana capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa belum mampu merealisasi belanja yang dapat menghasilkan realisasi pendapatan desa secara maksimal, karena selama pandemi Covid-19 rata-rata desa tidak mampu mengalokasikan belanja desa untuk pengelolaan BUMDES sehingga selama pandemi BUMDES sama sekali tidak beroperasi sehingga tidak mampu merealisasikan pendapatan asli desa (PADes).
3. Kinerja keuangan pemerintah desa di Kecamatan Pino Raya dan Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan di Masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 dilihat dari rasio efektivitas, secara rata-rata persentase rasio efektivitas sebesar 99% yang dikategorikan cukup efektif, hal ini menunjukkan bahwa pihak pemerintah desa di masa pandemi Covid-19 sudah cukup baik dalam merealisasikan pendapatannya dibandingkan anggaran pendapatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pino Raya dan Kecamatan Bunga Mas di Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah desa di Indonesia. Kedua, data yang digunakan hanya bersumber dari laporan realisasi APBDes tahun 2020–2021, sehingga tidak mencakup aspek non-keuangan atau faktor eksternal lain yang dapat memengaruhi kinerja keuangan desa, seperti kapasitas aparatur, partisipasi masyarakat, dan kondisi geografis. Ketiga, pendekatan value for money yang digunakan lebih menitikberatkan pada aspek kuantitatif, sehingga belum mampu menangkap secara menyeluruh dimensi kualitas layanan publik desa. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, memperpanjang rentang waktu pengamatan, serta mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan seluruh data laporan keuangan pemerintah desa yang dapat diperoleh secara langsung pada pemerintah desa yang bersangkutan, sehingga hasilnya dapat lebih terperinci mengenai kinerja keuangan pemerintah desa yang dilihat dari rasio ekonomi, efisien dan efektivitas.
2. Agar penelitian menjadi lebih baik, sebaiknya dilakukan penelitian pada sampel yang tidak terlalu luas, sehingga dapat menjelaskan penyebab peningkatan dan penurunan kinerja keuangan yang terjadi secara lebih terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- [2] Darmadi, Hamid. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- [3] Ghozali, I (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [4] Halim, A & Kusufi, M. S. (2017). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- [5] Iriani, N. I., Sasongko, T., & Sari, Y. I. (2021). *Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Perimbangan*. 9(1), 83–90.
- [6] Iznillah, M. L., & Basri, Y. M. (2019). Analysis of Transparency and Accountability of Village Fund Management in Bengkalis Sub-district. *Journal of Economics, Business, and Government Challenges*, 1(2), 72–78.
- [7] Kurniawan, N., & Adhivinna, V. (2016). Analisis Penerapan Konsep Value for Money pada Pemerintah Kabupaten Bantul. *Akmenika*, 13(1), 734-742.
- [8] Lestari, D. D. A., Pertiwi, I. B., Muchlisun, M., Kabib, N., & Anwar, S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018. *Ekonomi, Sosial Dan Humaniora*, 01(09), 19–29.
- [9] Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Ketiga). Edisi Tiga. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- [10] Mahsun, M. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFPE.
- [11] Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- [12] Mulyaningtyas. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Kota Mojokerto dengan Pendekatan Value For Money. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1–

- 14.
- [13] Ofasari, D. (2018). Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Menggunakan Metode Value For Money. *Jurnal ACSY: Jurnal Accounting Politeknik Sekayu VII*(2), 57–66.
- [14] Onibala, A., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 67–89.
- [15] Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa*.
- [16] Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa*.
- [17] Pratama, F. A., Sebayang, A. F., & Haryatiningsih, R. (n.d.). *Analisis Value For Money Pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Gadobangkong , Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat)*. 126–132.
- [18] Putri, T.W.W & Susliyanti, E. . (2019). Jurnal Solusi. *Jurnal Solusi*, 14(2), 103–114.
- [19] Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Penentuan Penerimaan Daerah Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan*.
- [20] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.
- [21] Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- [22] Sayadi, M. H. (2021). Apbn 2020: Analisis Kinerja Pendapatan Negara Selama Pandemi Covid-19. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 159–171.
- [23] Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian dan Pembangunan :R &D*. Bandung: Alfabet.
- [24] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian dan Pembangunan: R & D*. Bandung: Alfabet.
- [25] Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa Pandangan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press.
- [26] Syahputra, A. A., & Rahmat, M. (2021). Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Ekonomi dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. *JAJA: Journal of Accounting, Finance and and Auditing*, 3(1), 46–58.
- [27] Virginia, W. A., & Ramli, M. R. (2022). *Kinerja Keuangan Pemerintah Desa di Masa Pandemi Covid 19 , Studi Kasus Desa Lapara Kec . Siompu Kab . Buton Selatan The Financial Performance of The Village Government During The Covid 19 Pandemic , Case Study of Lapara Village , Siompu District of South*.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN